

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

V.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan mengenai prosedur perjalanan dinas pada Satuan Kerja Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian Perkebunan Kota Bogor, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

- 1) Ketentuan mengenai perjalanan dinas yang diterapkan pada Satuan Kerja Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian Perkebunan Kota Bogor mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119 Tahun 2023 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri. Dalam implementasinya, Badan Perakitan Dan Modernisasi Pertanian Perkebunan juga menerapkan kebijakan internal dalam bentuk Standar Operasioanl Prosedur (SOP) sebagai panduan untuk mengelola perjalanan dinas agar berjalan dengan tertib, efektif, dan sejalan dengan peraturan yang berlaku.
- 2) Prosedur perjalanan dinas yang diterapkan di Badan Perakitan Dan Modernisasi Pertanian Perkebunan Kota Bogor dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu tahap pengajuan perjalanan dinas, pelaksanaan kegiatan, pertanggungjawaban, hingga pembayaran biaya perjalanan dinas. Setiap tahapan melibatkan pihak yang berwenang sesuai dengan tugas dan tanggungjawab masing-masing serta didukung oleh dokumen administratif yang diperlukan, sehingga pelaksanaan perjalanan dinas bisa berjalan teratur dan sesuai dengan prosedur yang sudah ditentukan.
- 3) Berdasarkan hasil perbandingan yang telah dilakukan antara prosedur perjalanan dinas yang ada di Badan Perakitan Dan Modernisasi Pertanian Perkebunan Kota Bogor umumnya telah sesuai dengan ketentuan dalam PMK No. 119 Tahun 2023. Kesesuain tersebut terlihat dari tahapan penerbitan dokumen perjalanan dinas, pengaturan biaya perjalanan dinas, proses pertanggungjawaban, serta mekanisme pembayaran biaya perjalanan dinas. Meskipun demikian, dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa kendala internal, seperti keterlambatan dalam pengumpulan LPD.

V.2 Saran

Berdasarkan hasil observasi yang telah dilakukan mengenai Prosedur Perjalanan Dinas pada Satuan Kerja Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian Perkebunan Kota Bogor, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut :

- 1) Satuan Kerja Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian Perkebunan Kota Bogor diharapkan dapat meningkatkan ketelitian dan kedisiplinan pegawai dalam melengkapi dokumen pertanggungjawaban perjalanan dinas agar proses pemeriksaan administrasi dan pembayaran dapat berjalan lebih efektif.
- 2) Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian Perkebunan Kota Bogor diharapkan dapat memberikan pengingat atau sosialisasi secara berkala mengenai kelengkapan dokumen perjalanan dinas kepada pegawai sehingga kesalahan administrasi dapat diminimalkan.
- 3) Mengingat peraturan mengenai perjalanan dinas dapat mengalami perubahan dari waktu ke waktu, Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian Perkebunan Kota Bogor diharapkan melakukan penyesuaian terhadap prosedur perjalanan dinas apabila terdapat ketentuan baru yang diterbitkan oleh Kementerian Keuangan. Selain itu, diperlukan sosialisasi kepada seluruh pegawai agar setiap perubahan peraturan dapat dipahami dan diterapkan dengan baik dalam pelaksanaan perjalanan dinas.